

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### 1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Awal mula teori agensi di perkenalkan jansen dan meekling (1976). Teori keagenan menerangkan hubungan antara pemegang saham dengan pihak manajemen yang seringkali terjadi ketidaksinambungan informasi atau asimetri informasi karena adanya kepentingan pribadi yang dimiliki dari *principal* ataupun *agent*. Kepentingan pribadi yang dimiliki masing-masing individu menyebabkan terjadinya konflik keagenan, kemungkinan hal ini terjadi akibat adanya tindakan *agent* yang tidak sesuai dengan keinginan *principal*.

Asimetri informasi selalu ada saat informasi yang dimiliki dan didapatkan satu pihak dan pihak lain berbeda dan tidak saling terbuka, yang mana pihak yang memiliki informasi lebih tidak terbuka memberikan informasi yang dimiliki karena adanya kepentingan pribadi yang akan menimbulkan moral *hazard* antara pemilik dan manajer.

Moral *hazard* merupakan keadaan dimana resiko yang terjadi akan ditanggung oleh pihak yang seharusnya tidak menanggung resiko tersebut, dalam teori ini pihak pemilik harus menanggung resiko kejadian yang dilakukan oleh manajemen karena ketidakterbukaan informasi yang dilakukan manajemen.

Menurut Kayu (2012), aktivitas pemilik dan manajemen di lihat dari laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. keterkaitan teori keagenan, pihak yang memiliki modal melihat laporan auditor untuk memperkuat informasi dan menegaskan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan tidak adanya kecurangan saat pembuatan laporan keuangan tersebut.

Untuk melihat apakah laporan keuangan perusahaan sudah bebas dari penyelewengan saji maka diperlukan jasa KAP untuk memeriksa perusahaan dan mengeluarkan pendapat dari laporan keuangan yang di periksa. Auditor melakukan pemeriksaan tentunya akan mengeluarkan biaya audit untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dimana biaya audit juga termasuk *fee* audit yang akan di dapatkan auditor dari negoisasi antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Biaya yang dikeluarkan untuk jasa auditor dan opini yang diberikan akan membantu mengurangi kecurigaan atau permasalahan pemegang saham dan manajemen tentang kepentingan pribadi dan asimetri informasi.

## 2. Struktur Kepemilikan

### a. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial ialah skala saham biasa para pemegang keputusan manajemen perusahaan misalnya direksi atau dewan komisaris. Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yang memiliki peran pengambilan keputusan dalam perusahaan yang diukur berdasarkan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang ada.

### 3. Kepemilikan institusional

Merupakan saham kepemilikan yang dimiliki institusi atau lembaga yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham eksternal institusi, lembaga atau yang lainnya. Kepemilikan institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kemampuan dimiliki pada kepemilikan institusional yaitu untuk mengendalikan berbagai pihak terutama bagi manajemen melalui prosedur pemantauan.

### 4. *Corporate governance*

*Corporate governance* merupakan kebijakan yang secara keseluruhan mengatur korelasi antar pemilik saham, pemerintahan, pengelola perusahaan, kreditor, pegawai bahkan pemilik kepentingan dalam maupun luar perusahaan. Untuk mencapai *corporate governance* perlu adanya beberapa aspek yang akan mengawasi dan menjamin *corporate governance* telah dilaksanakan dengan perusahaan serta adanya struktur dan mekanisme *corporate governance*.

Di Indonesia *proxy* dari *corporate governance* diantaranya adalah pemegang saham, komisaris, direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan *stakeholder* lainnya. Dari beberapa item *corporate governance* diatas maka kesimpulannya bahwa struktur *corporate governance* adalah bagian dari organ dimana terdapat fungsi kepengurusan yang menjaga dan menjalankan perusahaan. Struktur struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta *corporate governance* yang akan diuji adalah proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan ukuran komite audit. Tata kelola perusahaan dilihat dari bagaimana tata kelola tersebut bekerja di dalam organisasi atau perusahaan.

Sebaik-baiknya tata kelola yang di atur dalam perusahaan jika dalam kenyataannya tidak terlaksana maka maksud akhir dari tata kelola tersebut tidak akan terwujud.

#### 5. Komisaris independen

Komisaris independen adalah dewan yang menjalankan pengawasan secara independen baik secara internal atau eksternal dan memberikan masukan untuk dewan direksi sebagai kegiatan manajemen. Komisaris independen adalah pihak yang berkaitan untuk mengurangi masalah konflik keagenan yang ada pada pemilik saham dan manajemen.

#### 6. Jumlah rapat dewan komisaris

Pertemuan yang dilakukan dewan komisaris akan memiliki dampak untuk pengawasan dan berjalannya tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi budaya yang baik dalam perusahaan. Rapat yang diadakan diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi kerja manajemen untuk hasil laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor.

#### 7. Jumlah rapat komite audit

Pertemuan yang dilakukan komite audit merupakan pertemuan yang harus dilakukan untuk membantu dewan komisaris, dan memberikan tanggung jawab terhadap dewan komisaris. Rapat yang diadakan akan meringankan beban dan kecurigaan dewan komisaris terhadap manajemen untuk hasil laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor.

## 8. Ukuran komite audit

Komite audit nantinya bekerja pada perusahaan untuk membantu dalam melakukan monitoring kinerja pada manajemen perusahaan agar nantinya dapat menghindari tingkat kecurangan dalam menerbitkan laporan keuangan yang merugikan para pengguna laporan keuangan. Dewan komite audit memiliki fungsi untuk mendampingi dan melihat kemajuan kinerja perusahaan dan bertanggung jawab dalam pelaporan laporan keuangan.

## 9. *Fee* audit

Agoes (2012) menyatakan bahwa *fee* audit adalah upah jasa yang bergantung kepada pekerjaan, jasa yang dimiliki dan kualitas yang diberikan terhadap laporan audit. Pengukur yang digunakan dalam pengukuran *fee* audit adalah risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, struktur cost dari kantor akuntan publik serta seberapa besar ukuran kantor audit yang memberikan jasa audit

Menetapkan imbalan atas jasa audit harus wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik, serta sesuai dengan kualitas hasil audit. *Fee* yang terlalu rendah akan mengakibatkan penurunan kualitas audit yang dimiliki oleh auditor dan menurunkan standar kompetensi yang ada di dalam diri auditor tersebut (Rizqiasih 2010).

Penetapan *fee* audit yang tinggi sering dikaitkan dengan kualitas auditor yang tinggi. Akurat atau tidaknya hasil laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian *fee* audit yang tinggi tergantung dengan kualitas audit yang disajikan.

Pada penjualan saham perdana, auditor yang berkualitas diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih tepat kepada calon investor mengenai aliran kas

perusahaan di masa mendatang. Dalam kondisi tertentu pemilik saham terkadang memilih auditor yang memiliki kualitas yang baik, untuk harapan informasi yang ditemui dan dihasilkan dapat meyakinkan para investor, sehingga harga saham menjadi tinggi.

#### 10. Kualitas audit

Kualitas audit dapat di lihat berdasarkan bagus atau tidaknya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Hasil pemeriksaan dikatakan bagus apabila telah sesuai dengan standar pengauditan. Beberapa standar pengauditan yaitu mutu professional, independensi, pertimbangan (*judgement*) yang akan di keluarkan untuk penilaian hasil audit

Kualitas merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dipertahankan bagi akuntan publik, akuntan publik harus mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan manajemen atau kepentingan pribadi auditor. Apapun kejadian dan peristiwa dapat terjadi saat auditor melakukan proses pemeriksaaan baik itu proses salah saji, pemeriksaan dan yang lainnya dan auditor harus bersikap independen sesuai dengan standar yang telah di tetapkan

### **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

#### 1. Kepemilikan manajerial dan *fee* audit

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yang memiliki peran pengambilan keputusan dalam perusahaan yang dilihat berdasarkan jumlah persen yang manajemen miliki. Kepemilikan manajerial merupakan

aspek *corporate governance* yang dapat mengurangi *agency cost* apabila persinya dalam struktur kepemilikan di perusahaan ditingkatkan.

Dengan adanya keterlibatan manajer dalam membantu dan mendorong manajer dalam bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil sebagai bagian dari pemegang saham. Semakin banyak kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan maka akan memaksimalkan laporan keuangan. Karena manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerja yang nantinya akan memberikan dampak lebih kepada perusahaan, terutama bagi para pemegang saham yaitu dirinya sendiri.

Oktorina dan Wedari (2015) menemukan pengaruh positif signifikan antara kepemilikan manajerial dengan *fee* audit dimana semakin tinggi kepemilikan manajerial perusahaan maka akan semakin tinggi *fee* audit yang dibayarkan untuk perusahaan yang mempunyai kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer cenderung untuk meminta cakupan audit yang luas dan memberikan sinyal positif pada tuntutan membuat laporan keuangan yang lebih valid.

Hal ini menyebabkan biaya yang dibayarkan kepada auditor independen semakin tinggi. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial yang dimiliki manajer, maka *fee* audit akan semakin tinggi karena dengan tingginya kepemilikan manajerial, manajer akan benar-benar menjaga laporan keuangan yang di sajikan.

Untuk menjamin laporan keuangan bebas dari salah saji, di perlukan jasa auditor yang independen yang akan menyebabkan biaya audit yang tinggi, salah satunya adalah *fee* audit. Oleh karena itu berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tipe

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *fee* audit**

2. Kepemilikan institusional dan *fee* audit

Kepemilikan institusional merupakan *corporate governance* yang dipandang bisa mengurangi biaya agensi. Oktarina dan Wedari (2015) tidak menemukan hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan *fee* audit. Hal tersebut karena kemampuan kepemilikan institusional yaitu untuk mengawasi berbagai pihak terutama bagi manajemen melalui fase pemantauan secara berkala. Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham pihak luar baik institusi, lembaga atau kelompok lainnya.

Di sisi lain, kepemilikan institusional dapat membantu dalam memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Jika kepemilikan institusional relatif besar akan memberikan upaya-upaya *monitoring* yang lebih intensif. *Monitoring* yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung terhadap besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan institusional yang besar dalam suatu perusahaan akan memberikan pengaruh yang besar dalam dorongan pengawasan pada kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja yang ada pada perusahaan akan meningkat secara signifikan.

Penelitian Khotimah (2014) dan Kusumaning (2016) yang menjelaskan bahwa *fee* audit yang meningkat tentunya menjadikan kualitas audit yang baik dimana membuat para investor cenderung untuk berinvestasi di perusahaan. Maka semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi *fee* audit yang dibayarkan (Khotimah, 2014). Dari perbedaan beberapa penelitian di atas, terdapat adanya



inkonsistensi hasil penelitian variabel kepemilikan institusional terhadap *fee* audit. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki manajer, maka *fee* audit akan semakin tinggi.

Karena tingginya kepemilikan institusional, salah satu penyebabnya ialah jasa auditor yang independen dimana diperlukan *fee* yang tinggi untuk membayar jasa auditor yang independen. Maka dapat disimpulkan bahwa tipe kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *fee* audit**

3. Keberadaan komisaris independen dan *fee* audit

Permasalahan atau konflik yang terjadi akibat adanya asimetri informasi menyebabkan perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan untuk mengatasi adanya asimetri informasi dan konflik dapat dilakukan dengan adanya pengawasan dari pihak perusahaan. Mekanisme yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan *corporate governance*. Di dalam *corporate governance* terdapat struktur yang salah satunya adalah dewan komisaris dan komite audit.

Dewan komisaris independen adalah dewan yang mengontrol keterjadian dengan independen baik eksternal maupun internal dan memberikan masukan untuk dewan komisaris untuk memajukan kegiatan manajemen. Komisaris independen merupakan komponen yang penting sebagai pihak yang dapat memecahkan masalah keagenan yang terjadi pada pemilik saham dan manajemen. Dalam pelaksanaan tata kelola

perusahaan mewajibkan komisaris independen guna memajukan dan memberikan iklim untuk lebih baik dan memberikan hasil kepada *stakeholder*.

Dalam melakukan pengawasan pihak komisaris independen akan terlepas dari relevansi berbagai pihak manapun oleh sebab itu akan menjamin pelaksanaan tata kelola yang baik pada perusahaan. Menurut Hazmi dan Sudarno (2013) menemukan hubungan negatif antara keberadaan komisaris independen terhadap *fee* audit.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraheni dan Sabeni (2013) yang menyatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen maka akan meningkatkan pengawasan lebih yang akan mengurangi penaksiran auditor yang mengarah ke *fee* audit yang semakin rendah.

Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa semakin dewan komisaris itu independen, maka *fee* audit akan semakin rendah karena dengan pengawasan yang independen akan mengurangi adanya kecurangan laporan keuangan sehingga akan mengurangi tugas auditor dan nilai *fee* audit. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

4. Jumlah rapat dewan komisaris

Menurut *Corporate Governance Guidelines* (2007) jadwal pertemuan tetap yang dimiliki dewan komisaris dapat dilakukan berdasarkan pertemuan yang ada maupun pertemuan tambahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Peran dewan komisaris berfungsi memonitoring keputusan manajemen. Dewan komisaris memiliki tugas yang wajib dalam melakukan *monitoring* atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya.

Oleh karena itu, kualitas kerja dilaksanakan oleh dewan komisaris dapat dinilai kinerjanya berdasarkan partisipasi kehadiran kegiatan rapat yang secara teratur diadakan. Rapat yang diadakan diharapkan dapat membantu dewan komisaris untuk melihat kinerja dan memberikan transparansi untuk *stakeholder*. Banyaknya pertemuan yang dilakukan akan berdampak terhadap pengawasan manajemen melaksanakan strategi dan motivasi perusahaan maka akan mengurangi jumlah *fee* audit yang diberikan

Hazmi dan Sudarno (2013) dan Octavia (2015) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. karena jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris cenderung rendah yaitu dilakukan 5 kali dalam setahun.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya intensitas rapat yang dilakukan dewan komisaris, maka *fee* audit yang dibayarkan akan menjadi rendah. Hal ini karena proporsi rapat yang tinggi akan meningkatkan ketekunan dewan komisaris, efektivitas dewan komisaris dan manfaat dengan para pemegang saham sehingga meningkatkan pengawasan laporan keuangan yang akan mengurangi tanggung jawab auditor

#### **H<sub>4</sub>: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fee audit**

##### 5. Jumlah rapat komite audit dan *fee* audit

Pertemuan yang dilakukan oleh komite audit akan sangat berdampak untuk menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan di laporan keuangan. Auditor yang sering membahas tentang hal-hal yang sekiranya dianggap perlu untuk mereka bahas dalam temuan yang mereka temukan saat melakukan pemeriksaan

laporan keuangan. Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Octavia (2015) yang menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit karena semakin sering komite audit melakukan pertemuan akan membuat *fee* audit semakin rendah. Pertemuan yang dilakukan komite audit diharapkan menjadikan laporan keuangan semakin baik sehingga mengurangi terjadinya kecurangan yang terjadi di laporan keuangan dan menyebabkan *fee* audit yang semakin rendah.

Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa semakin sering komite audit mengadakan pertemuan, maka *fee* audit akan semakin rendah karena dengan adanya pertemuan dan pembahasan tentang laporan keuangan yang sering dilakukan akan mengurangi adanya tindakan kecurangan dalam laporan keuangan tersebut.

Sehingga akan mengurangi kerja auditor dalam mendeteksi kecurangan dan otomatis akan menurunkan nilai *fee* audit. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah rapat komite audit maka semakin rendah *fee* audit yang diberikan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

**H<sub>5</sub>: Jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

## 6. Ukuran Komite Audit

Komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaporan, dan pertanggungjawaban langsung kepada komisaris. *The Blue Ribbon Company* (1999) menemukan hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan *fee* audit. Jumlah komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan kualitas

pelaporan keuangan yang baik diharapkan mampu mengurangi beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh auditor eksternal dan berakibat pada rendahnya *fee* audit.

Komite audit merupakan komite yang nantinya bekerja pada perusahaan untuk membantu dalam melakukan monitoring kinerja pada manajemen perusahaan agar nantinya dapat menghindari tingkat kecurangan dalam menerbitkan laporan keuangan yang merugikan para pengguna laporan keuangan. Pada kenyataannya bahwa komite audit dituntut untuk bekerja dalam mengawasi kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan secara akurat, lengkap, jelas dan teliti.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian Hazmi dan Sudarno (2013) dan Nugrahani dan Sabeni (2013) yang menyatakan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka *fee* audit semakin rendah karena dengan jumlah komite audit yang semakin banyak akan meningkatkan laporan keuangan dan meminimalisir kinerja auditor yang berdampak terhadap rendahnya *fee* audit yang diberikan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>6</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

#### 7. *Fee* audit dan kualitas audit

*Fee* audit adalah jumlah yang didapatkan auditor atas negosiasi antara auditor dan perusahaan atau pihak yang diaudit, besarnya *fee* audit yang didapatkan tergantung dengan bagaimana negosiasi dan kualitas audit yang diberikan oleh auditor. Kualitas audit akan mempengaruhi keputusan yang akan dilakukan oleh pihak pengguna laporan keuangan perusahaan untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan mereka.

Menurut penelitian Hartadi (2012) menyatakan bahwa untuk menentukan jumlah *fee* yang akan di berikan manajemen kepada auditor tergantung dengan bagaimana negosiasi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Pada saat melakukan negosiasi kemungkinan besar akan terjadi tindakan kecurangan yang mengesampingkan profesionalisme auditor dan menyebabkan penjagaan atas kualitas audit.

Agoes (2012) menyatakan bahwa auditor tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang berakibat terhadap kualitas audit. Semakin kompleks klien maka akan semakin sulit dan semakin lama waktu yang dihabiskan untuk mengaudit sehingga semakin tinggi *fee* audit yang diberikan. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa semakin tinggi *fee* audit yang diberikan maka semakin baik kualitas audit yang di sajikan

Hartadi (2012) dan Ukur (2016) menemukan bukti bahwa *fee* audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *fee* audit yang di berikan maka semakin baik kualitas audit yang di berikan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

**H<sub>7</sub>: *Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit**

### C. Model Penelitian

Gambar 2.1

Model Penelitian



